PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Transformasi Politik Digital melalui Implementasi e-Asmara dalam Meningkatkan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di DPRD Kabupaten Gresik

Ainatul Silvia[1], Khoirul Yahya[2]
[1] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: ainatulsilvia2@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 1th, 2026
Revised Nov 12th, 2026
Accepted Nov 21th, 2026

Keyword:
Transformasi Politik Digital; E-Asmara; DPRD Kabupaten Gresik; Aspirasi Masyarakat; E-Partisipasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Asmara (Elektronik Aspirasi Masyarakat) sebagai bentuk transformasi politik digital dalam mendukung penyerapan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan E-Asmara, observasi selama kegiatan magang, serta studi dokumentasi terhadap dokumen kelembagaan dan website resmi DPRD Kabupaten Gresik. Identitas informan tidak dicantumkan untuk menjaga kerahasiaan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Asmara menjadi alternatif penyampaian aspirasi masyarakat melalui kanal digital sekaligus melengkapi mekanisme konvensional seperti reses dan audiensi. Penggunaan platform ini mendukung proses pencatatan dan pengelolaan aspirasi secara lebih terstruktur serta membuka akses komunikasi antara masyarakat dan DPRD. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa sosialisasi yang belum merata, keterbatasan literasi digital, kebiasaan masyarakat menggunakan mekanisme penyampaian aspirasi secara langsung, serta koordinasi dalam proses tindak lanjut aspirasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas pengelola, dan kejelasan mekanisme tindak lanjut agar pemanfaatan E-Asmara dapat berjalan lebih optimal.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi politik digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada lembaga legislatif daerah. Transformasi politik digital tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan teknologi dalam aktivitas pemerintahan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan hubungan yang lebih terbuka, responsive, dan partisipatif antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi representasi yang menempatkan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik. Namun, mekanisme penyampaian aspirasi yang masih dilakukan bersifat manual sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan akses masyarakat, kurang optimalnya dokumentasi dan tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD Kabupaten Gresik menghadirkan E-Asmara (Elektronik Aspirasi Masyarakat) sebagai inovasi digital yang memungkinkanmasyarakat menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun usulan pembangunan secara lebih mudah, cepat, dan terpublikasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep e-government yang dikemukakan oleh (Indrajit, 2016), bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat penyampaian informasi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang

lebih transparan dan akuntabel. Tranformasi digital dalam sektor publik menjadi agenda penting dalam meuwujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Implementasi e-government memungkinkan pemerintah memanfaaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat interaksi antara pemerintah dan warga negara. Selain memberikan kemudahan akses layanan, transformasi digital juga mendorong terciptanya smart governance yang menekankan kolaborasi, keterbukaaan informasi, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Meskipun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola perubahan organisasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan.(Ibrohim, S.Sos., 2026)

Dalam perspektif politik digital, pemanfaatan teknologi informasi untuk menampung aspirasi masyarakatdikenal sebagai e-participation, yaitu penggunaan media digital untuk memperluas keterlibatan warga dalam proses pengambilan kebijakan publik. E-participation memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik tanpa harus hadir secara langsung dikantor pemerintahan. Kehadiran website digital semacam ini dapat meningkatkan kualitas komunikasi serta masyarakat dan pemerintah serta memperkuat praktik demokrasi yang lebh iknlusif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital dan kemudahan penggunaan platform menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat dalam layanan aspirasi berbasis elektronik.(Mukherjee & Chicago, n.d.)

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi layanan aspirsi pada lembaga legislative daerah mampu menigkatkan efektivitas penyerapan aspirasi mayarakat. Penelittian mengenai E-Aspirasi di DPRD Kabupaten Semarang menemukan bahwa inovasi digital tersebut efekttif dalam mengakomodasi aspirassi masyarakat karena memberikan kemudahan akses dan mempercepat proses penyampaian aspirasi(Aisa Selvia, n.d.). Penelitian lain mengenai digitalisasi administrasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat mengatasi berbagai hambatan birokrasi dalam pelayanan aspirasi masyarakat. Selain itu, implementasi program e-Aspirasi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan menunjukkan bahwa platform digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat meskipun masih menghadapi tantangan berupa sosialisasi dan kapasitas sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi E-Asmara sebagai inovasi digital dalam penyerapan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Gresik serta menganalisis perannya dalam mendukung politik digital pada lembaga legislatif daerah. Menurut (Creswell, 2009), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, pada Bagian Umum dan Bagian Humas yang mana menangani pengelolaan aspirasi masyarakat dan pelayanan informasi publik. Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dipilih karena merupakan instansi yang mengelola layanan E-Asmara (Eleketronik Aspirasi Masyarakat) sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat secara digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pengelolaan maupun pelaksanaan layanan E-Asmara di lingkungan DPRD Kabupaten Gresik. Identitas informan tidak dicantumkan dalam penelitian untuk menjaga kerahasiaan dan privasi narasumber. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui website resmi DPRD Kabupaten Gresik, dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, peraturan terkait, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan transformasi politik digital dan pelayanan aspirasi masyarakat berbasis elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan untuk memperoleh secara langsung mengenai implementasi E-Asmara serta perannya dalam mendukung penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Gresik. Observasi dilakukan selama kegiatan magang dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan aspirasi masyarakat, serta aktivitas pelayanan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi publik. Sementara itu, studi

literatur dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, peraturan perundang-undanga, serta informasi yang tersedia pada website resmi DPRD Kabupaten Gresik yang berhubungan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (B. Miles Matthew, n.d.) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi E-Asmara dalam meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Gresik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Asmara sebagai Wujud Transformasi Politik Digital di DPRD Kabupaten Gresik

Transformasi politik di era digital adalah kegiatan menggunakan teknologi informasi dalam bidang politik dan pemerintahan untuk menciptakan sistem yang lebih efesien, jelas, dan melibatkan masyarakat. Di Kabupaten Gresik, perubahan ini diterapkan melalui penggunaan E-Asmara (Elektronik Aspirasi Masyarakat) sebagai platform digital yang berfungsi untuk menerima, mengatur, dan menanggapi masyarakat secara online. Temuan tersebut juga didukung oleh dokumentasi publikasi DPRD Kabupaten Gresik melalui media sosial Instagram yang menampilkan pemanfaatan E-Asmara sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat secara digital. Publikasi ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya menyediakan platform layanan, tetapi juga berupaya mengenalkan mekanisme penyampaian aspirasi melalui media digital sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Keberadaan media sosial tersebut menjadi salah satu bentuk komunikasi publik dalam mendukung implementasi E-Asmara.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa implementasi E-Asmara mencerminkan penerapan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Menurut (Indrajit, 2016), pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat aliran informasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks DPRD Kabupaten Gresik, E-Asmara menjadi bentuk konkret digitalisasi pelayanan aspirasi yang mengubah mekanisme konvensional berbasis dokumen fisik menjadi layanan berbasis dokumen fisik menjadi layanan berbasis elektronik yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi. Perubahan tersebut tidak hanya mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga membantu DPRD dalam melakukan pengelolaan, pemantauan, serta tindak lanjut terhadap setiap aspirasi yang masuk secara lebih teratur.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hardjaloka, 2014) yang menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui akses informasi yang lebih cepat dan terbuka. Dengan adanya E-Asmara, masyarakat memiliki jalan alternatif komunikasi lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan mekanisme penyampaian aspirasi secara manual yang terkadang hanya menunggu waktu RESES. Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan E-Asmara masih mengalami beberapa kendala, khususnya mengenai tingkat penggunaan masyarakat yang belum maksimal. Masih ada masyarakat yang lebih memilih mengungkapkan aspirasi secara langsung melalui kegiatan RESES atau Audiensi karena belum mengetahui adanya platform tersebut. Keberhasilan transformasi politik digital dipengaruhi tidak hanya oleh teknologi, tetapi juga oleh tingkat literasi serta efektivitas sosialisasi kepada masyarakat.

Peran E-Asmara dalam Menigkatkan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, memiliki fungsi representasi yang salah satunya terwujud melalui pengumpulan aspirasi masyarakat. Keberadaan E-Asmara berperan dalam mendukung fungsi itu karena memudahkan masyarakat untuk mengajukan berbagai usulan, pengaduan, dan masukan dengan lebih cepat dan mudah. Berdasarkan wawancara dengan pengelola layanan aspirasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, E-Asmara mendukung peningkatan akses masyarakat ke lembaga legislatif. Sebelum munculnya platform digital ini masyarakat yang biasanya lewat surat, atau kegiatan anggota DPRD, namun setelah E-Asmara diterapkan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kapan saja melalui media digital sehingga kendala ruang dan waktu dapat

diminimalkan. Salah satu informan menjelaskan bahwa keberadaan E-Asmara memberikan alternatif bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tanpa harus selalu datang secara langsung ke kantor DPRD. (Wawancara, 2025)

Dalam perspektif e-government, pemanfaatan platform digital seperti E-Asmara merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut (Indrajit, 2016), penerapan e-government bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat penyampaian informasi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks DPRD Kabupaten Gresik, E-Asmara menjadi media yang mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tanpa harus datang secara langsung ke kantor DPRD atau menunggu kegiatan reses. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan aspirasi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap lembaga legislatif sehingga fungsi representasi DPRD dapat berjalan lebih optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Asmara turut meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aspirasi karena setiap aspirasi yang masuk dapat terdokumentasi dan dipantau proses tindak lanjutnya. Sistem digital juga membantu mengurangi kemungkinan kehilangan data aspirasi yang sering terjadi pada sistem administrasi manual. Dengan ddemikian, proses penyerapan aspirasi menjadi lebih akuntabel dan terstruktur. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Pratama, 2020) yang menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital mampu meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui akses layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Pemanfaatan platform digital juga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi E-Asmara

Keberhasilan implementasi E-Amara dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, adanya komitmen DPRD Kabupaten Gresik untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis digital. Kedua, tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional sistem. Ketiga, adanya dukungan dari Sekretariat DPRD dalam mengelola dan memonitor aspirasi yang masuk melalui platform tersebut. Selain itu, terbatasnya sosialisasi juga menjadi hambatan dalam menambah jumlah pengguna E-Asmara. Sebagaian masyarakat masih lebih akrab dengan cara menyampaikan aspirasi melalui reses atau pertemuan langsung dengan anggota DPRD dibandingkan memanfaatkan platform digital. Hambatan lainnya yang ditemukan adalah perlunya kerjasama yang terus menerus antara pengelola sistem dan pemerintah daerah terkait agar tindak lanjut aspirasi bias dilaksanakan dengan lebih cepat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi E-Asmara tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi digital, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan digital. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Heeks, 2005), yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi e-government di negara berkembang sangat bergantung pada kesesuaian antara aspek teknologi dan organiasi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sistem menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas dan berkelanjutan E-Asmara sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Gresik.

Keberhasilan implementasi E-Asmara juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital mampu menciptakan nilai tambah (juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital mampu menciptakan nilai tambah (public value) bagi masyarakat melalui kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan kualitas interaksi dengan lembaga pemerintah. Inovasi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks DPRD Kabupaten Gresik, E-Asmara memberikan alternative pelayanan yang lebih mudah dijangkau dibandingkan mekanisme konvensional, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebh luas untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh respon dari lembaga legilatif. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Sudrajat & Andhika, 2021), yang menyatakan bahwa inovasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan apabila didukung oleh pemanfaatan teknologi, kapasitas organisasi, dan orientasi pelayanan yang berfokus pada kebutuhan mayarakat.

Ringkasan Temuan dan Implikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, observasi selama kegiatan magang, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa implementasi E-Asmara di DPRD Kabupaten Gresik merupakan salah satu bentuk transformasi politik digital dalam mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Kehadiran E-Asmara memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara elektronik tanpa sepenuhnya menggantikan mekanisme konvensional seperti reses dan audiensi. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan sosialisasi, pemanfaatan layanan oleh masyarakat, dan koordinasi tindak lanjut aspirasi. Secara lebih rinci, ringkasan temuan penelitian disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan temuan dan bukti pendukung

Fokus penelitian	Temuan	Bukti pendukung
Implementasi E-Asmara	E-Asmara menjadi inovasi pelayanan aspirasi berbasis digital yang melengkapi mekanisme penyampaian aspirasi secara langsung.	Informasi mengenai layanan E-Asmara dan mekanisme penyampaian aspirasi secara elektronik.
Peran dalam penyerapan aspirasi	E-Asmara memberikan alternatif akses bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, pengaduan, dan masukan kepada DPRD tanpa harus selalu datang langsung ke kantor.	Keterangan mengenai perubahan mekanisme penyampaian aspirasi dari cara konvensional menuju layanan digital.
Pengelolaan aspirasi	Sistem elektronik mendukung proses pencatatan dan pengelolaan aspirasi sehingga informasi yang masuk dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur.	Pengamatan terhadap pengelolaan layanan serta keterangan informan mengenai mekanisme administrasi aspirasi.
Faktor pendukung	Dukungan kelembagaan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, dan keterlibatan Sekretariat DPRD menjadi unsur pendukung pelaksanaan E-Asmara.	Informasi mengenai pengelolaan dan dukungan operasional layanan.
Kendala implementasi	Pemanfaatan E-Asmara belum optimal karena sosialisasi yang belum merata, keterbatasan literasi digital, dan kebiasaan masyarakat menggunakan mekanisme penyampaian aspirasi secara langsung.	Keterangan informan dan hasil pengamatan selama kegiatan magang.
Tindak lanjut aspirasi	Penanganan aspirasi membutuhkan koordinasi antara pengelola layanan, komisi DPRD, dan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.	Keterangan mengenai proses pengelolaan dan koordinasi tindak lanjut aspirasi.

Sumber: *Hasil wawancara dengan beberapa informan (identitas dirahasiakan), observasi selama kegiatan magang, dan dokumentasi kelembagaan DPRD Kabupaten Gresik; diolah penulis.*

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa implementasi E-Asmara tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pelayanan aspirasi, tetapi juga mencakup perubahan mekanisme komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif. Kehadiran platform ini memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara lebih mudah melalui media digital. Di sisi lain,

mekanisme konvensional seperti reses dan audiensi tetap memiliki peran dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan anggota DPRD. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital memberikan dukungan terhadap proses pencatatan dan pengelolaan aspirasi secara lebih terstruktur. Namun, tersedianya platform digital belum secara otomatis menjamin tingginya partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang belum merata, keterbatasan literasi digital, serta kebiasaan masyarakat menggunakan saluran komunikasi secara langsung menjadi tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan E-Asmara. Selain itu, proses tindak lanjut aspirasi masih membutuhkan koordinasi antarlembaga dan kejelasan pembagian kewenangan.

Dengan demikian, implementasi E-Asmara perlu dipahami bukan hanya sebagai upaya digitalisasi pelayanan administrasi, melainkan juga sebagai bagian dari penguatan fungsi representasi DPRD. Keberhasilan platform ini tidak cukup diukur dari tersedianya layanan digital, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diterima, dikelola, ditindaklanjuti, dan memperoleh umpan balik yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengembangan E-Asmara di DPRD Kabupaten Gresik perlu diarahkan pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan reses, Sosperda, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan. Kedua, memperjelas mekanisme dan alur tindak lanjut aspirasi agar proses penanganannya lebih terarah. Ketiga, meningkatkan transparansi melalui pemberian informasi mengenai perkembangan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Keempat, memperhatikan perlindungan data pribadi serta kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa E-Asmara diposisikan sebagai kanal digital alternatif sekaligus pelengkap bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Gresik. Layanan dirancang secara hibrida, yaitu portal daring dan Kamis Aspirasi, dengan pencatatan elektronik dan pemantauan status. Kehadiran kanal tersebut berpotensi memperluas akses komunikasi masyarakat dengan lembaga legislatif dan membantu proses pencatatan aspirasi.

Namun, pemanfaatannya masih menghadapi kendala berupa sosialisasi yang belum merata, kebiasaan memakai kanal langsung, jarak antara ekspektasi pengirim dan kewenangan DPRD, serta kebutuhan penguatan koordinasi dan tindak lanjut kelembagaan. Optimalisasi E-Asmara perlu mencakup penguatan informasi publik, kapasitas pengelola, kejelasan prosedur tindak lanjut, dan mekanisme umpan balik. Kesimpulan mengenai peningkatan efektivitas penyerapan aspirasi belum dapat ditegaskan karena ukuran sebelum dan sesudah belum tersedia; hal ini perlu diuji dengan data penggunaan, dokumentasi proses, dan keterangan informan pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aisa Selvia, I. H. D. (n.d.). *EFEKTIVITAS E-ASPIRASI UNTUK MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI DPRD KABUPATEN SEMARANG*.

B. Miles Matthew, H. A. M. (n.d.). *QUALITATIVE DATA ANALYSIS*.

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *Book*, *16*(1), 167. https://doi.org/10.1016/j.math.2010.09.003

Hardjaloka, L. (2014). STUDI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA DAN NEGARA LAINNYA SEBAGAI SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK (Implementation Study on E-Government in Indonesia and Other Countries As A Solution in Eradicating Corruption in Public Sector). *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *3*(3), 435–452.

Heeks, R. (2005). *and Managing eGovernment*.

Ibrohim, S.Sos., M. S. (2026). *Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Indonesia : Evaluasi Konseptual terhadap Penerapan E-Government dan Smart Governance*. *16*(1), 26–39. https://doi.org/10.31943/aspirasi.v16i1.152

Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Elektronik Government*.

Mukherjee, S., & Chicago, U. S. (n.d.). *How IT allows E-Participation in Policy-Making Process*. 1–12.

Pratama, A. B. (2020). The landscape of public service innovation in Indonesia: A comprehensive analysis of its characteristic and trend. *Innovation and Management Review*, *17*(1), 25–40. https://doi.org/10.1108/INMR-11-2018-0080

Sudrajat, A., & Andhika, L. (2021). Empirical Evidence Governance Innovation in Public Service. *Jurnal Bina Praja*, *13*(3), 407–417. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.407-417